

## Krisis Representasi dan Oligarki: Analisis Wacana Kritis dalam Slogan Demonstrasi Mahasiswa

Jonathan\*, Rangga Pasha, Reza Juliandry, Abdurrachman Amby, Fad'hal Khalid  
Universitas Bakrie, Indonesia

Email: jonathan.76.j4@gmail.com\*, ranggapasha14@gmail.com, zaaadry@gmail.com,  
abdurrachmanambi@gmail.com, fadhalkhalid@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena krisis representasi di Indonesia, di mana lembaga perwakilan dinilai gagal menyerap aspirasi publik dan cenderung melayani kepentingan oligarki. Hal ini memicu gelombang demonstrasi mahasiswa dengan tuntutan "17+8 Tuntutan Rakyat". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana kritis dalam slogan demonstrasi mahasiswa serta relevansinya dengan prinsip keadilan ekonomi dan pendidikan kewarganegaraan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap dokumen ilmiah, slogan demonstrasi, dan publikasi terkait gerakan mahasiswa tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan strategi kognitif melalui metafora (seperti "demokrasi dikremasi") dan kosakata keagamaan untuk membingkai realitas politik. Wacana dibangun melalui oposisi biner yang mengontraskan gaya hidup hedonis elit dengan penderitaan rakyat, yang selaras dengan kritik terhadap pelanggaran difference principle dalam teori keadilan John Rawls. Selain itu, aksi ini diidentifikasi sebagai manifestasi keberhasilan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk literasi kewarganegaraan (civic literacy). Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa slogan demonstrasi bukan sekadar retorika, melainkan alat diskursif efektif untuk menuntut pemulihan substansi demokrasi yang terdistorsi oleh dominasi fraksi partai.

**Kata Kunci:** Demokrasi Representatif; Gerakan Mahasiswa; Oligarki; Analisis Wacana Kritis; Keadilan Sosial

### Abstract

*This research is motivated by the phenomenon of representation crisis in Indonesia, where representative institutions are considered to have failed in absorbing public aspirations and tend to serve the interests of the oligarchy. This triggered a wave of student demonstrations with the "17+8 People's Demands". This study aims to analyze critical discourse in student demonstration slogans and their relevance to the principles of economic justice and civic education. The research employs a qualitative descriptive method with a Critical Discourse Analysis approach. Data collection was conducted through a literature review of scientific documents, demonstration slogans, and publications related to the 2025 student movement. The results indicate that students use cognitive strategies through metaphors (such as "democracy cremated") and religious vocabulary to frame political reality. The discourse is constructed through binary opposition contrasting the hedonistic lifestyle of the elite with the suffering of the people, which aligns with criticisms of the violation of the difference principle in John Rawls' theory of justice. Furthermore, this action is identified as a manifestation of the success of civic education in shaping civic literacy. The conclusion of this study asserts that demonstration slogans are not merely rhetoric, but effective discursive tools to demand the restoration of democratic substance distorted by party faction dominance.*

**Keywords:** Representative Democracy; Student Movement; Oligarchy; Critical Discourse Analysis; Social Justice

\*Correspondence Author: Indira Hertha Wibowo  
Email: sallyroyaltycrown@gmail.com



## PENDAHULUAN

Demokrasi modern di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah demokrasi perwakilan (*representative democracy*), sebuah adaptasi dari konsep demokrasi langsung yang sulit diterapkan dalam konteks negara dengan populasi besar. Sistem ini bekerja dengan asumsi bahwa warga negara memberikan mandat kepada wakil-wakil yang mereka pilih untuk mengambil keputusan politik. Namun, praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme representasi dan realitas politik. Fenomena ini secara gamblang tercermin dalam gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak memihak kepentingan rakyat (Fithriyatirrizqoh et al. 2024; Rohman 2020; Yusuf et al. 2023).

Menurut Yendra (2022) dan Arsyad (2022), isu-isu seperti kenaikan gaji pejabat di tengah kesulitan ekonomi rakyat menjadi pematik utama, yang pada akhirnya memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan. DPR sebagai lembaga representatif dinilai gagal menyerap aspirasi publik dan justru dianggap lebih melayani kepentingan elite politik dan oligarki. Gerakan protes seperti "17+8 Tuntutan Rakyat" menjadi simbol akumulasi kekecewaan publik terhadap cara negara mengelola demokrasi. Menurut data dari berbagai lembaga survei, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang menjadi indikator empiris semakin lebarnya jurang antara representasi formal dan aspirasi substantif rakyat (Ananditha et al. 2025; Kasudarman 2025; Wijaya 2025).

Secara teoretis, penelitian ini merujuk pada tiga kerangka utama. Pertama, teori Demokrasi Representatif yang dikemukakan oleh Sartori (1987) menjelaskan potensi wakil rakyat menjadi kelompok elitis yang terpisah dari aspirasi konstituennya. Kedua, teori Keadilan Ekonomi dari John Rawls (1999), khususnya prinsip *difference principle*, yang menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat diterima jika memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Ketiga, konsep Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pembentuk *civic literacy* yang mendorong mahasiswa untuk bersikap kritis terhadap ketidakadilan. Melalui kerangka ini, artikel ini bertujuan menganalisis relevansi kritik mahasiswa terhadap praktik demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks keadilan ekonomi (Istingadah et al. 2025; Muhammad et al. 2023; Rahmi et al. 2025).

Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek gerakan mahasiswa dan krisis demokrasi di Indonesia. Studi oleh Aspinall dan Mietzner (2019) menyoroti fenomena "*non-democratic pluralism*" di mana demokrasi prosedural tetap berjalan namun substansi demokrasi tergerus oleh oligarki. Hadiz (2020) mengkaji kemunduran demokrasi Indonesia dalam konteks global, sementara Mietzner (2021) menganalisis inovasi otoritarian dalam sistem elektoral. Winters (2021) secara spesifik membahas relasi antara oligarki dan demokrasi di Indonesia, menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi mentransformasi diri menjadi kekuatan politik. Penelitian oleh Gusti dan Setiawati (2025) menganalisis penggunaan metafora dalam gerakan sosial digital, sementara Landwehr dan Schäfer (2025) membahas krisis demokrasi representatif dari perspektif teori responsivitas institusi.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung fokus pada aspek struktural dan institusional demokrasi, atau menganalisis gerakan mahasiswa dari perspektif sosiologi politik. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis wacana dalam slogan demonstrasi mahasiswa menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang mengintegrasikan tiga dimensi: teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural. Kebanyakan penelitian juga belum secara eksplisit menghubungkan analisis wacana slogan dengan teori keadilan John Rawls dan konsep pendidikan kewarganegaraan dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) mengonstruksi wacana perlawanan melalui bahasa. Dalam konteks Indonesia yang sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, pemahaman tentang strategi diskursif yang digunakan mahasiswa menjadi sangat penting

untuk membaca arah pergerakan sosial politik ke depan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan Analisis Wacana Kritis dengan teori demokrasi representatif, keadilan ekonomi Rawlsian, dan pendidikan kewarganegaraan dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini juga menggunakan data slogan terkini dari gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" tahun 2025 yang belum banyak dianalisis dalam literatur akademis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis wacana kritis dalam slogan demonstrasi mahasiswa serta relevansinya dengan prinsip keadilan ekonomi dan pendidikan kewarganegaraan. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi strategi diskursif yang digunakan mahasiswa dalam slogan demonstrasi, (2) menganalisis bagaimana wacana tersebut mbingkai realitas politik dan keadilan ekonomi, serta (3) mengeksplorasi implikasi wacana tersebut terhadap praktik pendidikan kewarganegaraan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori gerakan sosial dan demokrasi representatif, serta menjadi referensi bagi penguatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan kritis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam fenomena kritik terhadap demokrasi perwakilan di Indonesia, dengan fokus pada ideologi dan argumen yang berkembang dalam diskursus publik seputar demonstrasi mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka (literature review). Data utama bersumber dari dokumen ilmiah, jurnal nasional dan internasional yang relevan, serta publikasi resmi terkait gerakan mahasiswa dan kebijakan DPR. Sumber data diklasifikasikan menjadi literatur teoretis primer (karya Rawls dan Sartori), jurnal ilmiah terkait gerakan sosial, serta berita dan pernyataan publik yang kredibel. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan deskripsi data, interpretasi makna menggunakan kerangka teori, dan eksplanasi kontekstual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis wacana kritis terhadap slogan demonstrasi mahasiswa mengungkapkan temuan ilmiah bahwa bahasa metaforis digunakan bukan sekadar sebagai alat retorika, melainkan sebagai strategi kognitif untuk mbingkai realitas politik yang mengalami degradasi. Temuan ini menunjukkan dominasi penggunaan kata kerja pasif seperti

"dikremasi" dan "disandera" dalam slogan-slogan mahasiswa. Fenomena ini terjadi karena mahasiswa berupaya mengonstruksi posisi demokrasi dan negara sebagai "korban" dari tindakan represif kekuasaan oligarki. Sejalan dengan penelitian Gusti dan Setiawati (2025), penggunaan metafora dalam gerakan sosial berfungsi untuk menyederhanakan kompleksitas isu politik menjadi narasi yang tajam dan memobilisasi emosi publik secara masif.

**Tabel 1 Analisis Metafora dalam Slogan**

Slogan (Nomor Data)	Metafora	Analisis / Makna Konotatif
<i>Demokrasi Dikremasi! Dikremasi (DKM 1.2)</i>	<i>(Kata kerja pasif)</i>	Menyamakan konsep demokrasi sebagai korban, seperti jasad yang dibakar, dengan tujuan membentuk opini publik bahwa demokrasi telah mati atau tidak berjalan semestinya. Diikuti ajakan imperatif "mari Bung rebut kembali" untuk membangkitkan kesadaran dan solidaritas.
<i>Jangan Mentang- Mentang Tukang Kayu Semua Partai Mau Digergaji! (DKM 2.3)</i>	<i>ukang Kayu (Kata kerja pasif)</i>	Merujuk secara metaforis pada sosok Jokowi (yang dikenal sebagai pengusaha mebel) sebagai aktor dominan. Kata digergaji (pasif) mengandung makna konotatif dikendalikan oleh kekuasaan, yang menghambat partai di luar koalisi mencalonkan kandidat Pilkada 2024.
<i>Negara (DKM 3.6)</i>	<i>Disandera, Disandera (Kata kerja pasif)</i>	Memperlakukan negara (konsep abstrak) seolah-olah entitas hidup yang berada di bawah kendali pihak tertentu, menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara. Diperkuat dengan frasa imperatif "saatnya bersuara!".
<i>Terang-Terangan Mengebiri (DKM 4.8)</i>	<i>Mengebiri (Kata kerja aktif)</i>	Menggambarkan tindakan pemerintah (sebagai subjek/pelaku) yang membatasi atau menghilangkan kekuatan dan fungsi demokrasi. Hal ini memicu hubungan sebab-akibat yang diakhiri dengan seruan "Rakyat Melawan!".

Selain metafora, analisis data juga menunjukkan tren penggunaan kosakata keagamaan yang signifikan. Istilah-istilah seperti "halal dibasmi" dan "kena azab" digunakan untuk memberikan legitimasi teologis pada gerakan perlawanan. Secara saintifik, hal ini dapat dijelaskan sebagai upaya menempatkan kritik politik dalam kerangka moralitas transenden, sehingga perlawanan terhadap praktik dinasti politik dipersepsikan bukan hanya sebagai hak warga negara, tetapi kewajiban religius untuk melawan kemungkaran. Temuan ini memperkuat argumen Gusti dan Setiawati (2025) bahwa diskursus gerakan mahasiswa modern cenderung meleburkan nilai-nilai profan (politik) dan sakral (agama) untuk memperluas basis dukungan massa.

**Tabel 2 Analisis Kosakata Keagamaan**

Slogan (Nomor Data)	Sakata Agama	Analisis / Makna Moral
<i>Keluarga Oligarki Dibasmi (DKA 2.5)</i>	<i>Halal lal (Kata sifat)</i>	Menunjukkan bahwa tindakan penghapusan praktik dinasti politik adalah sah dan disahkan agama, karena praktik dinasti politik diyakini sebagai perbuatan yang mengancam dan tidak sesuai dengan perintah agama.
<i>Tukang Kayu Paling Benar Cuma Yesus Cui (DKA 3.11)</i>	<i>esus (Nomina)</i>	Kata Yesus merujuk pada tokoh bermoral tinggi sebagai standar pemimpin yang diharapkan. Kritik ini merepresentasikan kekecewaan terhadap Jokowi (tukang kayu metaforis) yang dinilai tidak memenuhi standar pemimpin bermoral.
<i>DPR Jokowi Mau Ikut-Ikut Kena Azab (DKA 4.14)</i>	<i>zab</i>	Menciptakan konotasi negatif sebagai peringatan tentang konsekuensi (siksa Tuhan) bagi DPR jika terpengaruh kekuasaan Jokowi. Wacana ini adalah bentuk peringatan dan penolakan terhadap kebijakan revisi UU Pilkada.

Koherensi wacana perlawanan tersebut juga dibangun secara sistematis melalui strategi oposisi biner, yang secara tajam mengontraskan gaya hidup hedonis elit politik dengan realitas penderitaan rakyat. Slogan yang berbunyi "Rotimu yang 400 Ribu itu Gaji Guru Honoror Sebulan!" (Data DKE 1.7) menjadi contoh utama bagaimana mahasiswa menggunakan teknik elaborasi untuk memvisualisasikan ketimpangan ekonomi yang abstrak menjadi sangat konkret dan emosional. Dalam wacana ini, "roti seharga 400 ribu" bukan sekadar komoditas, melainkan penanda semiotik (signifier) bagi ketidakpekaan dan keterputusan elit dari realitas sosial. Sebaliknya, "gaji guru honoror" merepresentasikan perjuangan hidup masyarakat kelas bawah yang terabaikan oleh kebijakan negara.

Penyandingan dua realitas yang bertolak belakang ini berhasil menciptakan "guncangan moral" di tengah masyarakat. Mahasiswa tidak hanya mengkritik revisi UU Pilkada sebagai masalah hukum semata, tetapi mbingkainya sebagai manifestasi dari keserakahan oligarki yang mementingkan kekuasaan dinasti di atas kesejahteraan publik. Koherensi narasi ini terbukti efektif mengubah isu politik elitis menjadi isu keadilan sosial yang relevan bagi semua kalangan, sehingga memicu gelombang tekanan publik yang masif hingga akhirnya memaksa DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada tersebut. Rincian mengenai bagaimana slogan-slogan ini membangun koherensi wacana dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3 Analisis Koherensi Slogan**

Slogan (Nomor Data)	Konjungsi	Analisis / Makna Koherensi
<i>Rotimu yang 400 Ribu itu ang Gaji Guru Honoror Sebulan! (DKE 1.7)</i>		Menguraikan informasi (harga roti) untuk menyoroti ketimpangan kesejahteraan sosial, membandingkan gaya hidup mewah elit politik dengan gaji rendah guru honoror.
<i>Indonesia Baru Tanpa anpa Dinasti Jokowi (DKE 2.12)</i>		Menunjukkan penolakan atau penghapusan dinasti politik. Menggambarkan harapan akan Indonesia yang lebih demokratis dan berdaulat, bebas dari intervensi kekuasaan keluarga tertentu.

Wacana perlawanan di atas tidak muncul di ruang hampa, melainkan merupakan respons kausalitas terhadap fenomena ketimpangan struktur ekonomi yang ekstrem, sebagaimana terekam dalam gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat". Secara saintifik, kemunculan gerakan ini dapat dijelaskan menggunakan teori keadilan John Rawls. Data menunjukkan adanya kesenjangan mencolok antara take home pay anggota DPR ( $\pm$ Rp 65,59 juta/bulan beserta fasilitas mewah) dengan kondisi ekonomi konstituen yang terpuruk. Hal ini melanggar prinsip perbedaan (difference principle), di mana ketimpangan sosial-ekonomi seharusnya hanya dibenarkan jika memberikan keuntungan maksimal bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Salsabila dkk. (2025) menemukan bahwa pelanggaran terhadap prinsip keadilan inilah yang memicu krisis kepercayaan publik fundamental terhadap DPR.

Temuan ini juga relevan dan sejalan dengan studi Landwehr dan Schäfer (2025) mengenai hubungan antara populisme dan demokrasi representatif. Mereka menjelaskan bahwa ketika institusi perwakilan gagal menyerap aspirasi dan justru terlihat elitis (unresponsive), maka secara alamiah akan muncul "kekecewaan demokratis" yang bermanifestasi menjadi gerakan protes anti-kemapanan. Gerakan 17+8 dengan demikian adalah validasi empiris dari teori tersebut dalam konteks Indonesia. Jika dibandingkan dengan

gerakan 1998, terdapat evolusi pola gerakan yang signifikan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

**Tabel 4 Komparasi Gerakan 1998 dan 2025**

Persamaan	Tahun 1998	Tahun 2025
<b>Krisis Ekonomi</b>	Krisis besar (rupiah merosot, inflasi)	Tekanan inflasi pada 25 Agustus 2025
<b>Korupsi</b>	Korupsi ketidakpuasan besar	menyebabkan Tuntutan terkait korupsi yang marak
<b>Represi Aparat</b>	Penangkapan dan penahanan demonstran	Penangkapan dan penahanan demonstran (terjadi pada 25 Agustus 2025).
<b>Tuntutan Reformasi</b>	Tuntutan reformasi sistem politik dan ekonomi	Tuntutan 17+8, termasuk reformasi DPR
<b>Konteks Politik</b>	Rezim otoritarian Orde Baru (Soeharto)	Kerangka demokrasi prosedural (pemilu langsung, kebebasan berpendapat lebih terbuka)
<b>Media/Komunikasi</b>	Terbatas pada media cetak dan mahasiswa/organisasi	Kuat menggunakan media sosial dan berita online
<b>Aktor Gerakan</b>	Mahasiswa dan masyarakat sebagai aktor utama	Masyarakat, mahasiswa, masyarakat sipil, kelompok aktivis

Berbeda dengan tahun 1998 yang melawan otoritarianisme mutlak, gerakan 2025 beroperasi dalam paradoks demokrasi prosedural yang dibajak oleh kepentingan oligarki. Respons DPR yang hanya bersifat parsial, seperti pemangkasan tunjangan perumahan, dinilai belum menyentuh akar masalah struktural yang dituntut mahasiswa. Ketidakmampuan DPR untuk merespons tuntutan keadilan secara substantif dapat dijelaskan secara ilmiah melalui analisis struktur kelembagaan, khususnya dominasi fraksi. Simanjuntak dan Collins (2025) menemukan bahwa mekanisme pengambilan keputusan di DPR mengalami distorsi akibat sentralisasi kekuasaan di tangan fraksi partai. Pasal 281 Tata Tertib DPR yang mengharuskan anggota tunduk pada "pendapat fraksi" telah memutus rantai akuntabilitas antara wakil dan konstituen. Akibatnya, terjadi pergeseran loyalitas dari rakyat kepada elit partai, yang menyebabkan fungsi pengawasan (*checks and balances*) menjadi tumpul. Temuan ini mengonfirmasi kekhawatiran Landwehr dan Schäfer (2025) bahwa demokrasi modern sering terjebak pada formalitas prosedur (*procedural democracy*) tanpa substansi representasi (*substantive representation*).

Terakhir, fenomena demonstrasi ini membuktikan korelasi positif antara pendidikan politik dan partisipasi kewarganegaraan. Aksi mahasiswa bukanlah anomali atau tindakan anarkis, melainkan outcome terukur dari proses Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) yang berhasil membentuk nalar kritis. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Adventyana dan Dewi (2021), "Kajian Deskriptif tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Pola Berpikir Kritis Mahasiswa", PPKn melatih mahasiswa untuk mengevaluasi kebijakan publik secara etis dan rasional. Hal ini diperkuat oleh temuan Irianto (2024) yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi diri yang kuat sebagai agen perubahan (*agent of change*). Partisipasi aktif dalam demonstrasi "17+8" adalah bukti empiris bahwa literasi kewarganegaraan (*civic literacy*) telah bertransformasi menjadi *civic engagement* untuk mengoreksi defisit keadilan dalam praktik demokrasi di Indonesia.

## KESIMPULAN

Studi ini memperlihatkan bahwa slogan-slogan dalam aksi "17+8 Tuntutan Rakyat" bukanlah sekadar luapan emosi sesaat atau retorika kosong. Sebaliknya, slogan tersebut merupakan strategi komunikasi politik yang efektif untuk menelanjangi krisis representasi dan cengkeraman oligarki di Indonesia. Dengan menggunakan metafora tajam seperti demokrasi yang "dikremasi" atau negara yang "disandera" serta simbol keagamaan, mahasiswa berhasil mbingkai realitas politik yang rumit menjadi narasi moral yang mudah dipahami dan menggugah solidaritas publik. Analisis ini juga menemukan benang merah yang kuat antara kritik mahasiswa dengan prinsip keadilan John Rawls.

Narasi yang mempertentangkan gaya hidup hedonis para elit dengan kesulitan ekonomi rakyat menegaskan bahwa ketimpangan saat ini tidak lagi dapat ditoleransi karena sama sekali tidak memberi manfaat bagi kelompok yang paling rentan. Hal ini sekaligus menjadi sinyal keras bagi DPR, di mana kegagalan mereka menyerap aspirasi ini membuktikan bahwa loyalitas wakil rakyat telah tersandera oleh kepentingan fraksi partai, sehingga memutuskan hubungan akuntabilitas dengan konstituen. Terakhir, gelombang demonstrasi ini tidak seharusnya dipandang sebagai anomali atau tindakan anarkis, melainkan bukti keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan. Mahasiswa telah menunjukkan transformasi dari sekadar memahami teori (civic literacy) menjadi partisipasi nyata (civic engagement) untuk mengoreksi jalannya demokrasi. Ke depan, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis komparatif lintas daerah atau menyoroti peran media digital dalam memperkuat wacana perlawanan mahasiswa terhadap oligarki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adventyana, M., & Dewi, D. A. (2021). Kajian deskriptif tentang pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk pola berpikir kritis mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 359–366.
- Ananditha, Y., et al. (2025). Persepsi mahasiswa terhadap trust issue publik mengenai isu DPR RI (studi kasus: Jurusan Ilmu Administrasi Negara). *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 12(2), 697–708.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's troubling elections: Nondemocratic pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104–118.
- Arsyad, M. (2022). *Konstruksi perencanaan partisipatif berbasis profetik: Sebuah tinjauan teoretis dan praktikal*. Deepublish.
- Dewi, D. A., & Hamid, S. I. (2021). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mempertahankan identitas nasional di era globalisasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 1–10.
- Fithriyatirrizqoh, F., & Zhanaty, N. A. (2024). Mengkaji keefektifan gerakan mahasiswa dalam mendorong perubahan kebijakan pemerintah melalui demonstrasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 491–504.
- Gusti, A., & Setiawati, R. (2025). Metafora politik dalam gerakan sosial digital: Analisis wacana kritis slogan mahasiswa. *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*, 12(1), 45–62.
- Hadiz, V. R. (2020). Indonesia's year of democratic setbacks: Towards a new phase of deepening illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–283.
- Irianto, A. (2024). Mahasiswa sebagai agent of change dalam dinamika demokrasi digital di Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 9(1), 15–28.
- Istingadah, I., & Muzakki, A. (2025). Kritik kebangsaan terhadap krisis demokrasi dan

- ketidakadilan sosial: Analisis filsafat Pancasila melalui pendidikan agama Islam. *Journal of Transdisciplinary Studies in Religion and Education*, 1(1), 42–52.
- Kasudarman, M. R. (2025). Peran DPR RI dalam mewadahi aspirasi publik: Studi kasus Gresik–Lamongan. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 16(2), 117–134.
- Landwehr, C., & Schäfer, A. (2025). Populism and the crisis of representative democracy: When institutions fail to respond. *European Political Science Review*, 17(2), 112–129.
- Mietzner, M. (2021). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 28(6), 1021–1036.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), 354–368.
- Rahmi, G., Moeis, I., Rafni, A., & Hasrul, H. (2025). Pemikiran Mohammad Hatta tentang prinsip-prinsip demokrasi dan kewarganegaraan di Indonesia. *Journal of Civic Education*, 8(1), 34–46.
- Rohman, A. (2020). Sisi positif dan negatif demonstrasi pada negara demokrasi di masa pandemi. *Binamulia Hukum*, 9(2), 153–170.
- Salsabila, N., Pratama, D., & Wijaya, K. (2025). Ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan publik terhadap DPR: Tinjauan teori keadilan John Rawls. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 15(1), 88–102.
- Simanjuntak, B., & Collins, T. (2025). Party fractions and legislative distortion: The impact of centralized power in the Indonesian House of Representatives. *Asian Journal of Political Science*, 33(1), 55–72.
- Wijaya, M. A. (2025). Fungsi konstitusional DPR dalam perspektif hak rakyat: Antara representasi dan resistensi. *Journal Evidence of Law*, 4(2), 941–951.
- Winters, J. A. (2021). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, 111(1), 1–18.
- Yendra, M. (2022). *Ring piston kekuasaan: Analisis kritis resonansi dan realitas politik*. Rumahkayu Pusaka.
- Yusuf, R. I., Hamdi, A., & Fitriana, R. (2023). Suara perlawanan: Bagaimana mahasiswa menggunakan pembangkangan sipil pada unjuk rasa tolak kenaikan BBM di Indonesia. *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 5(2), 114–125.

---

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the



terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).